



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2024

Najwa Aulia Hoerunnisa¹, Dailibas²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 06 Februari 2026
Revised: 16 Februari 2026
Accepted: 28 Februari 2026

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat periode 2022-2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu 22 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga jumlah data yang diuji selama 3 (tiga) tahun sebanyak 66 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 27. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: i Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah.

(*) Corresponding Author:

najwaauliahoerunnisa@gmail.com, dailibas@feb.unsika.ac.id

How to Cite: Hoerunnisa, N., & Dailibas, D. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.A), 181-190. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12619>.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan masing masing pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Fernandes & Putri, 2022) pelaksanaan otonomi daerah juga muncul karena pemerintah pusat tidak mampu mengelola seluruh aspek pembangunan di daerah, maka pemerintah pusat memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerah mereka sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (Harahap, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat (Natalia & Novi, 2023). Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, output dari kekayaan yang terpisah, dll.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Secara umum belanja modal dapat dikatakan sebagai belanja aset jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat lebih dari satu tahun termasuk belanja infrastruktur (Andriana, 2020).

(Yayuk & Aufa, 2024) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemandirian keuangan, masalah ketergantungan terhadap dana pusat dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah masih menjadi isu permasalahan perlu diatasi dan dituntaskan. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia adalah ketidakmampuan mereka untuk menginvestigasi kemungkinan aliran pendapatan daerah, yang membuat mereka lebih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Krisniawati et al., 2021).

Pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunannya (Natalia & Suprpto, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam PAD yang masih belum dapat ditingkatkan untuk menutupi belanja daerah terutama belanja modal yang merupakan pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang (Malau & Parapat, 2020). Sehingga untuk menutupi tingginya belanja daerah, pemerintah daerah masih harus bergantung pada alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat (Prastiwi & Aji, 2020).

Hal ini pun terjadi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dimana pada penerimaan daerahnya yaitu Pendapatan asli daerah dan Belanja modal menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat periode tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dapat memberikan dorongan pemerintah agar selalu memaksimalkan dan memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik dilihat dari ketercapaiannya Pendapatan Asli Daerah yang meningkat setiap periodenya. Sedangkan kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik dilihat juga dari Belanja Modal (Wahyudin & Hastuti, 2020). Sehingga, dengan menyusun jumlah realisasi anggaran belanja modal dengan tepat maka akan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

(Prastiwi & Aji, 2020) melaksanakan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian (Budiana & Rahayu, 2021) Hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian oleh (Maulina et al., 2021) Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut (Putri & Priyadi, 2021) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan grand theory dalam penelitian ini. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, menjelaskan hubungan terdapat dua pihak atau entitas yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (principal) dan yang pihak menerima kewenangan (agen). Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta

kepuasan masyarakat sebagai prinsipal. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam bidang keuangan dilaksanakan dengan teratur agar tidak adanya kecurangan dan transparansi terhadap masyarakat (principal).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan bahwa, “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan”.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa, “kinerja keuangan pemerintahan daerah merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran denan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, diantaranya terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari tahun 2022-2024 merupakan populasi dari penelitian ini. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, dimana populasi yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu 22 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga jumlah data yang diuji selama 3 (tiga) tahun sebanyak 66 data.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dengan metode dokumentasi atau dilakukan dengan studi pustaka berupa jurnal, buku, dan artikel, dan catatan untuk laporan historis yang diarsipkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024 yang berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal yang diperoleh melalui Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui www.djpk.kemenkeu.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Model	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation

PAD	66	118.83	1826.52	590.90 61	365.57833
BM	66	44.85	1052.28	374.00 82	238.42835
KINERJA KEUANGAN	66	10.79	106.52	33.366 2	20.87195
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

a. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 118.83 diperoleh dari kota Banjar tahun anggaran 2023, dan nilai maksimumnya sebesar 1826.52 diperoleh dari kabupaten Karawang tahun anggaran 2024. Nilai mean sebesar 590.9061 dan nilai standar deviasi sebesar 365.57833.

b. Belanja Modal

Hasil analisis deskriptif variabel Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024, memiliki nilai minimum Belanja Modal diperoleh dari Kota Banjar tahun 2024 yaitu sebesar 44.85 dan nilai maksimum diperoleh dari Kabupaten Bandung tahun 2024 yaitu sebesar 1052.28. nilai rata-rata (mean) sebesar 374.0082 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 238.42835.

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024, memiliki nilai minimum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 yaitu sebesar 10.79 dan nilai maksimum diperoleh dari Kota Bogor tahun 2024 yaitu sebesar 106.52. nilai rata-rata (mean) sebesar 33.3662 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 20.87195.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12.45822923
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.059
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.197
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: *Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)*

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas, nilai uji statistik Kolmogorov-Smirnov dari pengelolaan SPSS hasil yang didapatkan berdasarkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,197 lebih besar dari dari $\alpha = 0,05$ yang berarti data terdistribusi secara normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa data residual Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas

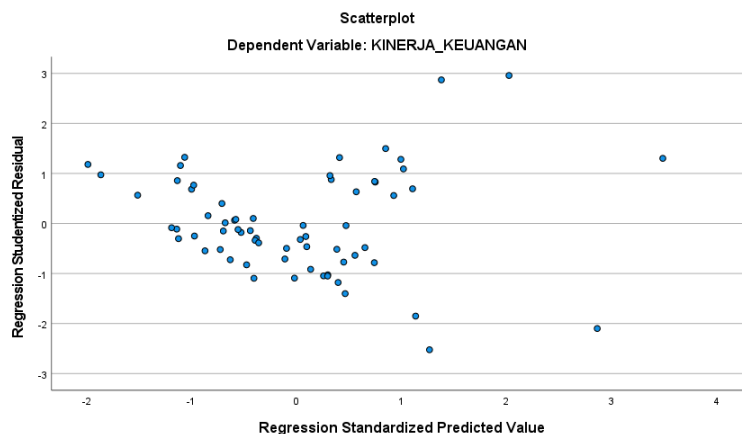
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.431	2.319
	BM	.431	2.319

Sumber: *Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)*

Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinearitas, pada nilai VIF variabel Pendapatan Asli Daerah adalah $2,319 < 10,00$, sedangkan nilai tolerance sebesar $0,431 > 0,10$. Maka model regresi linier berganda dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Sedangkan, pada nilai VIF variabel Belanja Modal adalah $2,319 < 10,00$, sedangkan nilai tolerance sebesar $0,431 > 0,10$. Maka model regresi linier berganda dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas (pendapatan asli daerah dan belanja modal) dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Diagram Scatterplot



Sumber: *Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)*

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot pada gambar diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar dibawah atau sekitar angka 0 pada sumbu Y, tidak membentuk pola yang jelas sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada

model regresi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.644	.632	12.65443	1.978
a. Predictors: (Constant), BM, PAD					
b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN					

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

Berdasarkan nilai Durbin-Watson dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,978 maka dari tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,664 ($4 - dU = 4 - 1,664 = 2,336$) dan batas bawah (dL) 1,539. Jadi dapat disimpulkan $dU < DW < 2 - dU = 1,664 < 1,978 < 2,336$ artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa data pendapatan asli daerah, belanja modal dan kinerja keuangan tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1.

Analisis regresi linier berganda

Tabel Uji Analisis regresi linier berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.846	3.092		7.065	.000
	PAD	.070	.007	1.222	10.667	.000
	BM	-.079	.010	-.907	-7.919	.000
a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN						

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

Hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 4.6 ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 21.846 + 0,070X_1 + (-0,079) X_2$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 21,846 yang menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah jika tidak ada variabel independen yang dianggap konstan ($X_1 = 0$ dan $X_2 = 0$) maka kinerja keuangan hasilnya konstan sebesar 21,846.

- b. Nilai koefisien untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,070. Nilai tersebut bernilai positif yang dapat diartikan bahwa, apabila variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,070.
- c. Nilai koefisien untuk variabel Belanja Modal sebesar -0,079. Nilai tersebut bernilai negatif yang berarti hubungan pengaruhnya berlawanan dan apabila variabel Belanja Modal mengalami peningkatan maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun sebesar 0,079.

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.846	3.092		7.065	.000
	PAD	.070	.007	1.222	10.667	.000
	BM	-.079	.010	-.907	-7.919	.000

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji parsial (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan tabel hasil uji regresi berganda untuk variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar $10,667 > 1,998$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
- Berdasarkan tabel hasil uji regresi berganda untuk variabel Belanja Modal didapatkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar $-7,919 < 1,998$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Uji Simultan (Uji-f)

Tabel Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18228.007	2	9114.003	56.915	.000 ^b
	Residual	10088.486	63	160.135		
	Total	28316.493	65			

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), BM, PAD

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

Pengujian pada tabel diatas menunjukkan nilai $F_{hitung} 56,915 > f_{tabel} 3.143$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.644	.632	12.65443	1.978
a. Predictors: (Constant), BM, PAD					
b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN					

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 27 (2025)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis koefisien determinasi diperoleh hasil *Adjusted R²* sebesar 0,644 atau 64,4%. Hal ini artinya variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh 64,4% terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya ($100\% - 64,4\% = 35,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,667 > 1.998$ dengan nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023.

Penelitian ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Julianti et al., 2024), (Wahyudin & Hastuti, 2020), (Prastiwi & Aji, 2020), (Ester, 2023), (Maulina et al., 2021), (Anggraini & Widajantie, 2024), dan (Widajanto et al., 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-7.919 < 1.998$ dengan nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Penelitian ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Priyadi, 2021), (Ester, 2023), dan (Widajanto et al., 2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menggunakan uji simultan (uji F) memperoleh nilai F_{hitung} yang lebih besar daripada F_{tabel} yaitu $56,915 > f_{tabel}$ 3.143 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,644 atau 64,4% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan belanja modal sebesar 64,4% dan sisanya 35,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2022-2024.

KESIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.
2. Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.
3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Anggraini, U. A., & Widajantie, T. D. (2024). Influence of Regional Original Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of the Regional Government of Jombang District. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)*, 4(1), 36–45. <https://doi.org/10.53067/ije3.v4i1.233>
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Ester, N. T. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.

- <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(2), 141–152. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Krisniawati, Zulkarnain, M., & Yuliana. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–13.
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 287–302. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). PENGARUH LEVERAGE , DANA PERIMBANGAN , DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Widajanto, M. B., Dewi, P. P., & Anggraeni, R. F. D. A. (2022). The Influence of Regional Original Revenues, Balancing Funds and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Regional Governments of East Java Province. *Indonesia Accounting Research Journal*, 10(2), 40–47. <https://doi.org/10.35335/iarj.v10i2.7>
- Yayuk Musrini, & Aufa, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 221–236. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2961>